



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUB UNIT KERJA : BIDANG STATISTIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TUBAYANU
2. Jabatan : KEPALA BIDANG STATISTIK
3. NHK : 209579

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.210.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/96 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/37 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 120 m2 di KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 114.500.002**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
2. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 1
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 1
4. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 125.010.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 104.338.226**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 1.553.848.228**

III. HUTANG **Rp. 546.390.000**



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.007.458.228

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **12 September 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.